

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Oemar Seno, 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Candra Parata, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Apeldoorn, Van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan dari Inleiding Tot De Studie Het Nederlandse Recht oleh Oetarid Sadino*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Bentham, Jeremy, 2000, “*An Introducon to the Principles of Morals and Legislation*”, Kitchener: Batoche Books.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna 2018, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Pemerintah / Onrechtmatige Oerheidsdaad (OOD) dari sudut pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Deepublish, Yogyakarta
- Hadi, Sutrisno, 1989, *Metode Penelitian Hukum*, UNS Press, Surakarta.
- Hadjon, Phillipus M., 2019, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan ke-13*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mahadi, 2003, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, cetakan ke-3, Bandung.
- Manullang, E. Fernando, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Notohamidjoyo, O., 1975, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan : Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta

Paton, G.W., 1969, *A Textbook of Jurisprudence*, Oxford University Press.

Pound, Roscoe, 1974, *An Introduction to the Philosophy of Laws*, Yale University Press, London.

Prawirohamidjojo, Soetojo, dan Pohan, Marthalena, 1979, *Onrechtmatige Daad*, Djumali, Surabaya.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum, Cetakan ke-V*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Said, Muhtar, 2019, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Thafa Media, Yogyakarta.

Saragih, Djasadi, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Diktat, Surabaya.

Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta.

Soeroso, 2011, "*Pengantar Ilmu Hukum*", PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Surakhmad, Winarno, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito, Yogyakarta

Usfunan, Johannes, 2002, *Perbuatan Pemerintah yang dapat digugat*, Djambatan, Jakarta.

Jurnal

Abrianto, Bagus Oktafian, et al., *Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*, Jurnal Negara Hukum : Vol. 11, No. 1, Juni, 2020.

Atmadja, Dewa Gede, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana Volume 12, Nomor 2, Juni, 2018.

Lathif, Nazaruddin, *Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*, Pakuan Law Review, Vol. 3, No. 1, Mei, 2017.

Muhlizi, Arfan Faiz, *Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, No. 1, April, 2012.

Prang, Amrizal J., *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad)*, Jurnal Transformasi Administrasi Volume 03 Nomor 02. September, 2013.

Uke, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo, *Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)*, Jurnal Al-'Ad. Vol. 10. No. 1, Januari 2017.

Weda, Ni Komang Dewi Novita Indriyani, *Et.al "Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No.1/G/2017/PTUN.DPS)*, Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 2 No. 1 Februari 2021

Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko, *Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, Jurnal Supermasi, Volume 11, Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Peradatan (KUH Perdata)/ *Burgerlijk Wetboek* (B.W)

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 30/G/2020/PTUN-MDN.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :
23/G/2020/PTUN.PBR.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 138/G/2019/PTUN-
BDG.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :
30/G/TF/2020/PTUN.BNA.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 22/G/2020/PTUN-SBY.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/G/TF/2019/PTUN-
JKT.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 753/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 405 /Pdt.G /2020 / PN.Bdg

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 449/PDT/2021/PT SBY

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 220/Pdt.G/2018/PN.Cbi

Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 61/Pdt.G/2017/PN. Pal

Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 5/PDT.G/2015/PN.BON.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor
22/B/TF/2021/PTTUN-MDN

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 24 P/ HUM/2020 terkait Permohonan Uji
Materil terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

Sumber lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan
Nasional, Jakarta.

Internet

<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/154874>, diakses pada tanggal 21
Juli 2021

<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/163775> diakses pada tanggal 21
Juli 2021

http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/55213 diakses pada tanggal
23 Juli 2021

[https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah akademik ruu tentang hukum a
cara perdata.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hukum_a_cara_perdata.pdf), diakses pada tanggal 25 September 2021

[https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi
Pengadilan-Tata-Usaha-Negara-Dalam-Sistem-Peradilan-Di-Indonesia](https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi_Pengadilan-Tata-Usaha-Negara-Dalam-Sistem-Peradilan-Di-Indonesia),
diakses pada tanggal 24 September 2021.